



**KESBANGPOL**  
**PROVINSI LAMPUNG**



2  
0  
2  
2

# LAPORAN KINERJA (LKj)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

## ***Ikhtisar Eksekutif***

---

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tahun keempat, aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2022, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2019-2024 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang memuat, 1 (satu) pernyataan Tujuan dan 2 (dua) pernyataan Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2022.

Sesuai Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 yang telah ditetapkan terdapat 6 (enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 yang tersedia sebesar **Rp 20.481.768.777,15,-** yang terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp 20.138.692.777,15,-** dan belanja modal sebesar **Rp 343.076.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp 18.318.694.913,00,-** terdiri dari realisasi anggaran belanja operasi sebesar **Rp 17.976.619.913,00,-** dan realisasi anggaran belanja modal sebesar **Rp 342.075.000,00,-** dengan capaian kinerja sebesar 113,77%.

## ***Kata Pengantar***

---

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, dan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perjalanan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024, selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian misi organisasi sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Subtansi Laporan Kinerja SKPD sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam tahun 2022 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 kiranya dapat

memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Telukbetung, Januari 2023

**KEPALA BADAN,**



**Drs. M. FIRSADA, M. Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

# DAFTAR ISI

---

	<i>Hal</i>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<i>i</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<i>ii</i>
<b>DAFTAR ISI</b>	<i>iv</i>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<i>v</i>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<i>vi</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>I.1 LATAR BELAKANG</b>	<i>I-1</i>
<b>I.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA         DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG</b>	<i>I-2</i>
I.2.1. <i>Tugas dan Fungsi</i>	<i>I-5</i>
I.2.2. <i>Struktur Organisasi</i>	<i>I-6</i>
<b>I.3 ISU STRATEGIS</b>	<i>I-13</i>
<b>1.4 LANDASAN HUKUM</b>	<i>I-16</i>
<b>1.5 SISTEMATIKA PENULISAN</b>	<i>I-17</i>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>II.1. PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024</b>	<i>II-1</i>
II.1.1. <i>Visi dan Misi</i>	<i>II-1</i>
II.1.2 <i>Tujuan, Sasaran dan Indikator</i>	<i>II-1</i>
II.1.3. <i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>II-2</i>
<b>II.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b>	<i>II-3</i>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA</b>	<i>III-2</i>
<b>III.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN         KINERJA</b>	<i>III-3</i>
<b>III.3 REALISASI ANGGARAN</b>	<i>III-17</i>
<b>III.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN</b>	<i>III-19</i>
<b>III.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL         EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI         PEMERINTAH</b>	<i>III-21</i>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. <i>Matrik Renstra 2020-2024</i>	
2. <i>Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi         Pemerintah T.A 2021</i>	

## ***Daftar Gambar***

---

	halaman
Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	I-7
Gambar III.1 Penerimaan Penghargaan	III-21

## ***Daftar Tabel***

---

		halaman
Tabel I.1	Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	I-4
Tabel I.2	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	I-4
Tabel I.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	I-15
Tabel II.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	II-2
Tabel III.1	Pencapaian Kinerja Sasaran	III-2
Tabel III.2	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022	III-3
Tabel III.3	Pencapaian Sasaran 1	III-4
Tabel III.4	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Menurunnya Potensi Konflik Menjadi Peristiwa Konflik di Provinsi Lampung Tahun 2022	III-6
Tabel III.5	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 1	III-10
Tabel III.6	Pencapaian Sasaran 2	III-13
Tabel III.7	Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022	III-14
Tabel III.8	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022	III-15
Tabel III.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 2	III-16
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Tahun 2022	III-17
Tabel III.11	Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2022	III-18
Tabel III.12	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022	III-19
Tabel III.13	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	III-22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi

terhadap negara dan masyarakat serta salah satu upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Provinsi Lampung pada khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Proses penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 ini adalah LKj keempat dari Perubahan Renstra 2019-2024.

## **I.2 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key Word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Development*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda, yang pertama, pembangunan diarahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangunan sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses “menjadi” ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain, proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Character Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah dengan menggunakan pendekatan preventif (ideologis) dan reaktif

(praksis). Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian sosialisasi, sarasehan, seminar, lokakarya, pelatihan/pendidikan bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, Akademisi, Praktisi Ormas/LSM, maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Metodologi yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis), yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bersama dengan jajaran/lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD). Terlebih pada era reformasi nasional yang mengarah kepada iklim demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi, bergeser ke pola desentralisasi, yang berimplikasi pula pada perubahan peran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, yang harus makin responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis.

Perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan tersebut salah satunya adalah penyerahan urusan/kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan disamping memberikan harapan secara faktual juga menimbulkan ekspekstasi dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketentraman masyarakat yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintah yang mempunyai visi, misi, dan strategi yang terintegrasikan dalam suatu manajemen strategis yang didukung oleh

perencanaan strategis yang komprehensif, yang mampu mengatasi permasalahan aktual bangsa, seperti ancaman disintegrasi bangsa dan negara, konflik sosial dan politik, *euphoria* reformasi dan otonomi daerah, serta pengaruh negatif globalisasi yang tentunya menghambat pelaksanaan agenda reformasi nasional, juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan hal itu, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, jujur dan berdisiplin tinggi.

**Tabel I.1**

**Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

No.	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

**Tabel I.2**

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

JUMLAH PEGAWAI	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL PNS	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 53	S3 : 0	IV/d : 2	Ess II : 1	
PTHL : 5	S2 : 16	IV/c : 0	Ess III : 5	
	S1 : 21	IV/b : 4	Ess IV : 1	
	D3 : 3	IV/a : 8		

	SLTA : 11	III/d : 11		
	SLTP : 1	III/c : 7		
	SD : 0	III/b : 6		
		III/a : 4		
		II/d : 8		
		II/c : 2		
		II/b :		
		II/a : 1		

**Jenis Kelamin**

- a. Laki-laki : 39 ORANG
- b. Perempuan : 14 ORANG

**I.2.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi, dalam menjalankan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, teknis kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

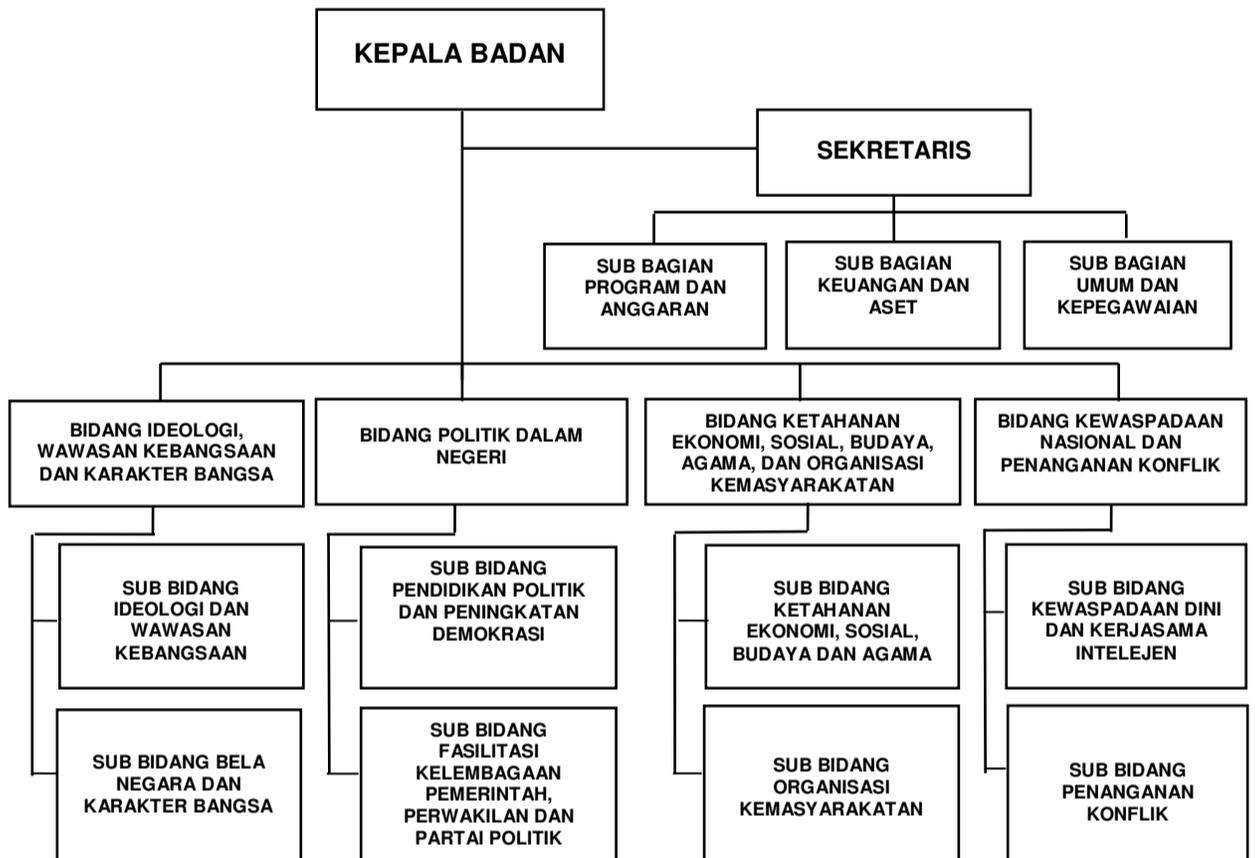
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

### **I.2.2 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**Gambar I.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
(Pergub Lampung Nomor: 56 Tahun 2019)



**a. Sekretaris**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretaris, membawahi :

- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.

➤ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.

➤ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:

1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

### **c. Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

➤ Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.

➤ Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.

➤ Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

- 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik.

#### **d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,

pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

- 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

#### **e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan:

- Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen.
- 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.

### **I.3. ISU STRATEGIS**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, maka masalah- masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah:

a. Bidang Politik Dalam Negeri:

- 1) Tingginya dinamika perkembangan politik di Provinsi Lampung;
- 2) Belum optimalnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Provinsi Lampung;

- 3) Rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan/*stakeholder* kepemiluan di Provinsi Lampung;
  - 4) Minimnya wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik perempuan, kaum difabel, pemilih pemula dan kaum muda milenial di Provinsi Lampung.
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa:
- 1) Menurunnya pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Provinsi Lampung;
  - 2) Masih terdapatnya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
- 1) Masih banyaknya potensi konflik sosial, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung;
  - 2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi/lembaga dalam pendataan dan pemantauan Warga Negara Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:
- 1) Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda di Provinsi Lampung;
  - 2) Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama dan konflik pendirian tempat ibadah;
  - 3) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

**Tabel I.3.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa.	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan.
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di Masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik.	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis.
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, telaah visi- misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Lampung ke depan, yaitu:

1. **Kondusivitas Wilayah:** Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. **Toleransi:** Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. **Demokrasi:** Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

#### **I.4. LANDASAN HUKUM**

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019 – 2024;
- f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampung;
- g. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **I.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2022 adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum, dan Sistematika.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **II.1 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019-2024**

##### **II.1.1. Visi dan Misi**

Mengacu pada visi pembangunan Provinsi Lampung tahun 2005-2025 yang telah digariskan oleh Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2007, serta mencermati potensi dan permasalahan Provinsi Lampung, maka visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024 adalah :

##### **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

**Misi ke-1 dari RPJMD yaitu:** Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

##### **II.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator**

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	80	80	87,5	90
		Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	72,25	72,25	72,75	73,00

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

### II.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

## **II.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

**TELUKBETUNG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 800/228/VI.07/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2021-2024**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA BADAN



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung  
 Nomor : 800/228/VI.07/2023  
 Tanggal : 10 Maret 2023

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan terjadinya pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Indikator ini dipilih untuk memantau dan mengevaluasi aksi penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung</p> <p><b><u>Rumus Perhitungan :</u></b> (Jumlah potensi konflik menjadi peristiwa konflik sosial tahun n : Jumlah potensi konflik n-1) x 100 %</p>	-	-	80	80	87.5	90	Kesbangpol Kab/Kota se- Provinsi Lampung
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis</p>	-	-	72.25	72.25	72.75	73	BPS

			<p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Indikator ini dipilih untuk memantau dan mengevaluasi jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilih</p> <p><b><u>Rumus Perhitungan :</u></b> (Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : Jumlah Daftar Pemilih Tetap) x 100 %</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Bandar Lampung, 10 Maret 2023

KEPALA BADAN



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAI DI**  
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

**Pihak Kedua,**

GUBERNUR LAMPUNG,

**ARINAL DJUNAI DI**

**Pihak Pertama,**

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**Drs. M. FIRSADA, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19670515 198901 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	80%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	72.25

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 16,298,283,377.15	P APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,019,837,800.00	P APBD
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 516,799,000.00	P APBD
4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 188,433,000.00	P APBD
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 1,214,593,000.00	P APBD
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1,243,822,600.00	P APBD
<b>Total</b>	<b>Rp. 20,481,768,777.15</b>	

Telukbetung, Oktober 2022

**Pihak Kedua,**  
GUBERNUR LAMPUNG



**ARINAL DJUNAIDI**

**Pihak Pertama,**  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG



**Drs. M. FIRSADA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670515 198901 1 001

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	Blue
2	Tinggi	$76 \leq 90$	Green
3	Sedang	$66 \leq 75$	Purple
4	Rendah	$51 \leq 65$	Yellow
5	Sangat Rendah	$\leq 50$	Red

Sumber: Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### III.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2022 disajikan pada tabel 3.2 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2022.

**Tabel III.2**

**Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2022		CAPAIAN
				Target	Realisasi	
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	%	80	100	125,00
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Angka	72,25	74,09	102,54

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2022, dari 2 (dua) buah indikator tersebut di atas kinerjanya melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, kegiatan untuk memberikan penjelasan

lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel III.3**  
**Pencapaian Sasaran 1**

Sasaran 1											
Sasaran 1		Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.									
IKU <sup>(1/2)</sup>		Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.									
Satuan		%									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
15	15	100,00	15	15	100,00	80	100	125,00	80	100	125,00

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di tengah masyarakat. Sasaran menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi

Lampung memiliki 1 indikator. Indikator kinerja pertama adalah Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125,00% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan telah mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelum perubahan tahun 2021, sasaran menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 dengan capaian kinerja masing-masing 100% maka kinerja meningkat sebesar 25%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 (125,00%) maka kinerja tetap.

Sasaran 1			
Sasaran 1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.		
IKU <sub>(1/2)</sub>	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.		
Satuan	%		
2024		Nasional 2022	
Target	Capaian	Realisasi	
90,00	111	-	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 111%.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, pada tahun 2022 terdapat 70 potensi konflik yang terpetakan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsosbud sebanyak 9 kasus, Sumberdaya Alam/Lahan sebanyak 55 kasus, dan SARA sebanyak 6 kasus. Sampai

dengan akhir tahun 2022, dari 70 potensi konflik yang terdata tidak ada satupun yang menjadi peristiwa konflik. Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam rangka mencegah terjadinya potensi konflik menjadi peristiwa konflik di Provinsi Lampung sebagai tabel berikut:

**Tabel III.4**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung**  
**Menurunnya Potensi Konflik Menjadi Peristiwa Konflik di**  
**Provinsi Lampung Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>I</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	%	<b>25</b>	<b>24,60</b>	<b>98,40</b>
1	Rapat Program Kerja FPK	orang	40	40	100
2	Rapat Program Kerja GNRM	orang	40	40	100
3	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
4	Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Ekstrimisme di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
5	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Provinsi Lampung	orang	100	100	100
6	Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	90	90
7	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Lampung	orang	100	69	69
8	Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme di Provinsi Lampung	orang	100	58	58
9	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Lampung	orang	100	86	86
10	Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	90	90
11	Sosialisasi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	99	99
12	Sosialisasi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	110	100	90,90

13	Sosialisasi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung	orang	100	125	125
14	Rapat Program Kerja GNRM	orang	50	50	100
15	Rapat Program Kerja FPK	orang	50	50	100
16	Rapat Kerja PPWK	orang	50	50	100
17	Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan (Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat)	orang	154	185	120.12
18	Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan (Memperkokoh Peran Keluarga Dalam Menangkal Paham Radikalisme)	orang	120	168	140
19	Rapat Kerja FPK	orang	50	50	100
20	Rapat Kerja PPWK	orang	50	50	100
21	Rapat Kerja GNRM	orang	50	50	100
22	Upacara Bela Negara	orang	450	450	450
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
1	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Ormas di Kab. Tanggamus	orang	100	99	99
2	Dialog Interaktif Dengan Organisasi Masyarakat di Provinsi Lampung	orang	35	35	100
3	Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kab. Tulang Bawang	orang	100	100	100
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
1	Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	orang	150	150	100
3	Pembinaan Pondok Pesantren di Kabupaten Pesawaran	orang	150	150	100
4	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN di Provinsi Lampung	orang	50	50	100
5	Pembinaan Pondok Pesantren dalam Mencegah Ekstrimisme	orang	100	100	100
6	Pembinaan Pondok Pesantren	orang	85	85	100
7	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Kab. Tanggamus	orang	150	150	100
9	Pembinaan Pondok Pesantren Di Kabupaten Tanggamus	orang	150	150	100
10	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	orang	35	35	100
12	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Kab. Tulang Bawang	orang	150	150	100
14	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung	orang	100	100	100
15	Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	orang	150	150	100
16	Pembinaan Pondok Pesantren	orang	85	85	100
17	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN di Provinsi Lampung	orang	50	50	100

18	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN di Provinsi Lampung	orang	50	50	100
19	Pembinaan Pondok Pesantren Dalam Mencegah Ekstrimisme	orang	100	100	100
20	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
21	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
22	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
23	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
24	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
25	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
26	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
27	Sosialisasi IPWK dalam Mencegah Radikalisme di Pondok Pesantren	orang	100	100	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	%	<b>25</b>	<b>21,95</b>	<b>87,83</b>
1	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme dan Radikalisme Bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
2	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa	orang	70	70	100
3	Rapat Koordinasi Stabilitas Dan Kewaspadaan Dini Daerah	orang	50	20	40
4	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Organisasi Masyarakat Dan Tokoh Agama	orang	70	70	100
5	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung	orang	45	28	62,22
6	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme dan Radikalisme bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
7	Rapat Koordinasi Stabilitas dan Kewaspadaan Dini Daerah	orang	50	21	42
8	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa	orang	70	70	100
9	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B 08 Provinsi Lampung	orang	50	50	100
10	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) bagi Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama	orang	70	70	100
11	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa	orang	70	70	100
12	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	46	92

13	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
14	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
15	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
16	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	43	86
17	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme Dan Radikalisme Bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
18	Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme Dan Radikalisme Bagi Mahasiswa	orang	150	150	100
19	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	26	52
20	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B 08 Provinsi Lampung	orang	30	27	90
21	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
22	Pembinaan Kewaspadaan Nasional Terhadap Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan (ATHG)	orang	70	70	100
23	Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung	orang	50	28	56

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Capaian indikator Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung didukung oleh 4 (empat) program dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 24,60% sehingga capaian kinerja program sebesar 98,40%;
- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%;
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dari target sebesar

25% terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%; dan

- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari target sebesar 25% terealisasi sebesar 21,95%, sehingga capaian kinerja program sebesar 87,83%.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada sasaran strategis 1 menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung didukung oleh 4 (empat) program, 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sebagai berikut:

**Tabel III.5**

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 1**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila</li> <li>• Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Ekstrimisme</li> <li>• Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda</li> <li>• Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental</li> <li>• Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan</li> <li>• Upacara Hari Bela Negara</li> </ul>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog interaktif dengan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Pemantapan Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Ormas</li> </ul>

<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika</li> <li>• Pembinaan Pondok Pesantren</li> <li>• Sosialisasi Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam mencegah Radikalisme</li> </ul>
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Pencegahan Penanggulangan Ekstrimisme, Terorisme dan Radikalisme</li> <li>• Pembinaan Kewaspadaan Nasional terhadap ATHG</li> </ul>

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya:

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik.
3. Tersedianya buku pemetaan dan penanganan daerah rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai macam faktor, serta dapat menjadi

pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

Meskipun capaian sasaran 1 sudah optimal, namun masih ditemukan kendala, sebagai berikut:

1. Pluralitas masyarakat Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi potensi konflik jika tidak disikapi dengan bijak dan benar.
2. Masih adanya ancaman peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung di tengah-tengah masyarakat.
3. Masih ada organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
4. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung masih belum sepenuhnya merata sehingga kesenjangan ekonomi tersebut memungkinkan mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan dan kerukunan bangsa.
2. Meningkatkan upaya cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dengan ormas untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan rasa nasionalisme.
4. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi.

**Tabel III.6**  
**Pencapaian Sasaran 2**

Sasaran 2											
Sasaran 2		Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.									
IKU <sup>(2/2)</sup>		Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.									
Satuan		Angka									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
72,00	80,60	111,94	72,25	74,09	102,54	72,25	74,09	102,54	72,25	74,09	102,54

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara memiliki kebebasan politik yang setara. Sasaran peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik memiliki 1 indikator, yaitu Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dengan realisasi sebesar 74,09% dari target sebesar 72,25% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,54% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan telah mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelum perubahan tahun 2021, sasaran meningkatnya indeks hak-hak politik Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja indeks hak-hak politik Provinsi Lampung pada tahun 2019 dan 2020 dengan capaian kinerja masing-masing 111,94% dan 102,54% maka kinerja meningkat sebesar 9,4% daripada tahun 2019 dan tetap daripada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 (102,54%) maka kinerja tetap.

Sasaran 2			
Sasaran 2		Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	
IKU <sup>(2/2)</sup>		Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	
Satuan		Angka	
2024		Nasional 2022	
Target	Capaian	Realisasi	
73,00	101,49	-	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 101,49%.

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian kinerja program sebesar 100%, sedang data prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada sebesar 74,09% masih menggunakan data hasil pemilukada 8 (delapan) kabupaten/Kota serentak se-Provinsi Lampung tahun 2020. Prosentase ini diperoleh dari perhitungan prosentase rata-rata partisipasi pemilih di 8 (delapan) kabupaten/kota. Adapun total jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel III.7**  
**Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah DPT	Prosentase
1	Lampung Selatan	457.537	704.367	64,96%
2	Lampung Tengah	654.189	922.398	70,92%
3	Lampung Timur	528.942	770.477	68,65%
4	Pesisir Barat	90.097	107.150	84,08%
5	Way Kanan	241.609	323.068	74,79%
6	Pesawaran	239.366	318.793	75,09%
7	Bandar Lampung	447.445	649.790	68,86%
8	Metro	98.857	115.844	85,34%
<b>Rata-rata partisipasi</b>				<b>74,09%</b>

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang

menunjang partisipasi penduduk dalam pemilu dan pilkada tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel III.8**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2022**

No.	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>V</b>	<b>Program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	%	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
1	Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung	orang	30	30	100
2	Sosialisasi Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di Kab. Pesisir Barat	orang	100	100	100
3	Focus Grup Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung	orang	80	80	100
4	Bimbingan Teknologi Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	orang	120	120	100
5	Rapat Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	orang	80	80	100
6	Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	orang	80	80	100

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Capaian kinerja prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih didukung oleh program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik, pada tahun 2022 dari target kinerja sebesar 25% terealisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Pada tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 berupa sosialisasi bagi pemilih pemula, pembinaan orpol dan ormas dan pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada sasaran strategis 2 peningkatan kehidupan demokrasi yang

menghormati kearifan lokal dan etika politik didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sebagai berikut:

**Tabel III.9**

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Sasaran 2**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN Pemerintahan PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pemilu 2024 terhadap Pemilih Pemula</li> <li>• Focus Group Discussion (FGd) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung</li> </ul>

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah terlaksananya pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat khususnya pemilih pemula sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis.

Meskipun capaian indikator kinerja sasaran 2 telah optimal, namun masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sehingga jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik masih sangat terbatas.
2. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Lampung yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.
2. Meningkatkan upaya edukasi berkelanjutan terkait wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik untuk mendukung kenaikan partisipasi politik masyarakat.

### III.3. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.10**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>BELANJA</b>	<b>20.481.768.777,15</b>	<b>18.318.694.913,00</b>	<b>2.163.073.864,15</b>	<b>89,43</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.138.692.777,15</b>	<b>17.976.619.913,00</b>	<b>2.162.072.864,15</b>	<b>89,26</b>
	Belanja Pegawai	6.525.849.837,15	6.179.271.735,00	346.578.102,15	94,68
	Belanja Barang dan Jasa	5.907.842.940,00	5.027.978.578,00	879.864.362,00	85,10
	Belanja Hibah	7.705.000.000,00	6.769.369.600,00	935.630.400,00	87,85
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>343.076.000,00</b>	<b>342.075.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>99,70</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.076.000,00	342.075.000,00	1.001.000,00	99,70

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.11**  
**Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran			Persentase Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Misi 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah.									
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	%	80	100	125,00%	13.664.969.777,15	11.584.023.513	56,55%	1
2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Angka	72,25	74,09	102,54%	6.816.799.000	6.734.671.400	32,88%	1
					113,77%	20.481.768.777,15	18.318.694.913	89,43%	

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.12**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Lampung Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Misi 1,</b>	.....		<b>18.318.694.913</b>	<b>89,43</b>
1	Memuaskan	.....	<b>113,77</b>		
2	Sangat Baik				
3	Baik	2			
4	Cukup Baik	.....			
5	Agak Kurang	.....			
6	Kurang	.....			

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi.

#### **III.4. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.**

Hasil evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial **tahun 2022** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memperoleh **“Peringkat 3 (tiga) Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021”**. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri. Penilaian pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial diukur berdasarkan sejauh mana rencana aksi telah dilaksanakan yang didukung dengan bukti pelaksanaan aktivitas pertemuan/penyusunan naskah/penerbitan dokumen/kegiatan lapangan seperti: notulensi, daftar hadir, foto kegiatan, materi, dan scan dokumen bertandatangan. Sesuai dengan tugas pokok yang dituangkan dalam SK

Gubernur Lampung Nomor: G/249/VI.07/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021, rencana aksi daerah penanganan konflik daerah telah disusun dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dengan nilai capaian sebesar 104,50%. Adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Mediasi & Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik berlatar belakang lahan/sda, sara, politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/industrial tahun 2021 di Kab/Kota;
2. Pencegahan dan atau Penanganan Konflik terkait Pandemi Covid 19;
3. Mensinergikan Sistem Peringatan Dini;
4. Pembinaan Kerukunan Beragama & Memberdayakan Peran Pondok Pesantran Dalam Mencegah Konflik;
5. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Radikalisme Melalui Bela Negara, Wasbang dan Cinta Tanah Air.

**Gambar III.1**  
**PENERIMAAN PENGHARGAAN**



Sumber: Dokumentasi Badan Kesbangpol Prov. Lampung

### **III.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun anggaran 2021 nomor: 700/13/IV.01/40/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung terdapat rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan beserta tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.13**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi**  
**Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	
	a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja dapat menyesuaikan mandate kebijakan nasional/program strategis nasional.	Dokumen teknis perencanaan kinerja telah disesuaikan dengan mandate kebijakan nasional/program strategis nasional.
	b. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung segera mengupdate dokumen kinerja/kegiatan pada laman website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Dokumen kinerja/kegiatan telah diupdate pada laman website resmi <a href="http://www.kesbangpol.lampungprov.go.id">www.kesbangpol.lampungprov.go.id</a>
	c. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai di RKA/DPA Perubahan dengan kode: - 08.01.01.1.01.03 - 08.01.01.1.01.05 - 08.01.01.1.01.06
2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	
	a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung lebih optimal dalam mekanisme pengumpulan data kinerja.	Telah dilakukan optimalisasi dalam mekanisme pengumpulan data kinerja secara berkala dan dilaporkan ke Biro Administrasi Pembangunan dalam laporan pelaksanaan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
	b. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Pimpinan selaku pengambil keputusan ( <i>Decision Maker</i> ).	Setiap pegawai telah melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pegawai.
	c. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Telah dilakukan arahan pada rapat internal maupun apel pagi oleh pimpinan kepada pegawai agar sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	
	a. Agar Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat sepenuhnya direviu oleh Pejabat yang berwenang.	Dalam penyusunan Dokumen laporan kinerja telah direviu oleh pejabat yang berwenang, telah dilakukan konsultasi serta koordinasi dengan Biro Organisasi.
	b. Agar Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam membuat Dokumen Laporan Kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja pada laporan evaluasi renja serta laporan evaluasi rencana aksi.
	c. Agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.	Telah dilakukan arahan pada rapat internal maupun apel pagi oleh pimpinan kepada pegawai agar dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.

4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021.	Hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
	b. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.	Bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi telah dilengkapi.
	c. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP 2021 dengan memberikan bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.	Hasil evaluasi SAKIP 2021 telah ditindaklanjuti dengan memberikan bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.

Sumber: Olahan data Badan Kesbangpol Prov. Lampung, Januari 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022. Penyusunan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024 “Rakyat Lampung Berjaya”, Provinsi Lampung telah menetapkan 6 (enam) misi. Dari 6 (enam) misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus untuk mendukung mewujudkan misi pertama yaitu menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah.

Dalam tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Untuk

menunjang pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut memperoleh kategori kinerja Sangat Tinggi dan telah mencapai target yang diperjanjikan, untuk sasaran pertama persentase capaian kinerja adalah 125,00% dan untuk sasaran kedua persentase capaian kinerja adalah 102,54%.

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran di semua bidang, maka secara umum perlu dilakukan beberapa hal seperti: Melaksanakan kegiatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat demi keutuhan dan kerukunan bangsa; Meningkatkan upaya cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat; Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dengan ormas untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan rasa nasionalisme; Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi; Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai; Meningkatkan upaya edukasi berkelanjutan terkait wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik untuk mendukung kenaikan partisipasi politik masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.481.768.777,15 sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp 18.318.694.913,00 (89,43%) dengan terdapat SILPA sebesar Rp 2.163.073.864,15,-.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2023

**KEPALA BADAN**



**Drs. M. FIRSADA, M. Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

# LAMPIRAN

**PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA INDIKATOR/ TARGET KINERJA DAN ANGGARAN  
BADAN KESBANGPOL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA					SATUAN	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		75	75	75	75	Persen		15,588,808,824	15,611,576,426	17,734,860,630	18,820,501,232
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		90	92.5	95	97.5	persen		144,718,500	183,918,500	265,936,600	311,123,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		5	5	5	5	dokumen		101,984,000	101,184,000	121,420,000	145,704,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD		4	4	4	4	dokumen		22,182,300	22,182,300	26,618,000	31,941,600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD			4	4	4	dokumen			20,000,000	20,000,000	20,000,000

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			4	4	4	dokumen			26,618,000	31,941,600	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			4	4	4	dokumen		20,000,000	20,000,000	20,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			12	12	12	laporan			26,618,000	31,941,600	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		14	14	14	14	laporan		20,552,200	20,552,200	24,662,600	29,595,000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Meningkatnya layanan administrasi keuangan</b>	<b>Prosentase layanan administrasi keuangan</b>		<b>85</b>	<b>90</b>	<b>92.5</b>	<b>95</b>	<b>persen</b>		<b>13,659,419,308</b>	<b>13,500,332,886</b>	<b>15,244,037,030</b>	<b>16,014,132,532</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		51	51	51	51	orang/bulan		6,521,254,908	6,375,742,886	6,694,530,030	7,029,256,532
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		39	39	39	39	dokumen		7,093,574,400	7,080,000,000	8,496,000,000	8,920,800,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		12	12	12	12	dokumen		22,414,000	22,414,000	26,896,000	32,276,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		18	18	18	18	laporan		22,176,000	22,176,000	26,611,000	31,800,000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Meningkatnya keselarasan laporan dan pengelola aset</b>	<b>Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset</b>		<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>		<b>11,684,000</b>	<b>23,368,000</b>	<b>42,060,000</b>	<b>50,400,000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4	4	dokumen				14,020,000	16,800,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			4	4	4	laporan			11,684,000	14,020,000	16,800,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		8	8	8	8	laporan		11,684,000	11,684,000	14,020,000	16,800,000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian</b>	<b>Prosentase layanan administrasi kepegawaian</b>		<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>persen</b>		<b>19,910,000</b>	<b>19,910,000</b>	<b>71,400,000</b>	<b>80,400,000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5	6	orang				45,000,000	54,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120	120	orang				13,200,000	13,200,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		181	181	120	120	orang/hari/kegiatan		19,910,000	19,910,000	13,200,000	13,200,000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Meningkatnya layanan administrasi umum</b>	<b>Prosentase layanan administrasi umum</b>		75	80	85	90	persen		1,144,993,016	1,251,078,200	1,347,350,000	1,463,919,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12	12	12	12	paket		14,574,200	14,574,200	17,489,000	20,980,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36	36	36	36	paket		183,228,600	345,505,000	414,606,000	497,527,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersediannya peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		12	12	12	12	paket		10,073,000	8,000,000	9,600,000	11,520,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediannya barang cetak dan penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		12	12	12	12	paket		28,978,216	25,000,000	27,500,000	30,000,000
Penyediaan Bahan/Material	tersediannya bahan/material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan		12	12	12	12	paket		150,780,000	100,780,000	120,936,000	145,123,200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersediannya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12	12	12	12	laporan		33,450,000	33,450,000	33,450,000	35,000,000

Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		60	60	60	60	laporan		723,909,000	723,769,000	723,769,000	723,769,000
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		75	77.5	80	82.5	persen		373,410,000	399,408,840	455,390,000	546,470,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	12	12	12	laporan		150,410,000	200,408,840	216,590,000	259,910,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	12	12	12	laporan		223,000,000	199,000,000	238,800,000	286,560,000
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>		60	62.5	65	67.5	persen		234,674,000	233,560,000	308,687,000	354,055,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		7	7	7	7	unit		185,170,000	185,170,000	203,687,000	224,055,700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		8	8	8	8	unit		33,324,000	32,210,000	75,000,000	80,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		100	100	100	100	unit		16,180,000	16,180,000	30,000,000	50,000,000
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat</b>	<b>Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat</b>		15	25	30	30	Persen		824,136,900	993,347,800	1,152,978,000	1,278,732,000
<b>KEGIATAN PERUMUSAN Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>meningkatnya pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	<b>prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan</b>		15	25	30	30	Persen		824,136,900	993,347,800	1,152,978,000	1,278,732,000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		9	12	12	12	dokumen		18,603,000	26,347,500	44,647,000	53,650,000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah		18	24	12	12	dokumen		85,606,200	96,373,000	44,647,000	53,650,000
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah				2740	2740	orang				953,884,000	1,049,272,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah		1940	2740	300	300	orang		715,381,200	867,167,500	105,600,000	116,160,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12	15	15	15	laporan		4,546,500	3,459,800	4,200,000	6,000,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung		15	25	30	30	Persen		160,033,000	158,433,000	176,516,300	208,619,000
<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase PEMBERDAYAAN dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		15	25	30	30	Persen		160,033,000	158,433,000	176,516,300	208,619,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas		560	495	500	500	orang		138,033,000	136,833,000	150,516,300	180,619,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas		15	15	15	15	laporan		22,000,000	21,600,000	26,000,000	28,000,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>		15	25	30	30	Persen		370,989,000	614,593,000	674,793,000	685,000,000
<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>	<b>Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>		15	25	30	30	Persen		370,989,000	614,593,000	674,793,000	685,000,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1445	1370	1400	1400	orang		348,989,000	592,993,000	652,293,000	660,000,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		15	15	15	15	laporan		22,000,000	21,600,000	22,500,000	25,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya peristiwa konflik sosial</b>	<b>Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung</b>		15	25	30	30	%		368,936,600	1,217,332,600	1,422,735,000	1,424,735,000
<b>KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		15	25	30	30	Persen		368,936,600	1,217,332,600	1,422,735,000	1,424,735,000

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan		8	2	4	4	dokumen		-	100,000,000	120,000,000	120,000,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan		750	950	1000	1000	orang		199,427,400	395,827,400	474,512,000	474,512,000



PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung		15	25	30	30	persen		515,619,000	492,819,000	545,335,000	601,352,900
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik		15	25	30	30	persen		515,619,000	492,819,000	545,335,000	601,352,900

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan		4	6	6	6	dokumen		7,823,800	7,823,800	9,400,000	11,280,000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		9	12	12	12	dokumen		12,617,000	12,617,000	15,140,000	16,000,000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		430	450	450	450	orang		184,378,700	182,778,700	201,056,000	221,160,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		1800	1230	1250	1250	orang		304,599,500	283,399,500	311,739,000	342,912,900

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		15	15	15	15	laporan		6,200,000	6,200,000	8,000,000	10,000,000
<b>JUMLAH</b>										<b>17,828,523,324</b>	<b>19,088,101,826</b>	<b>21,707,217,930</b>	<b>23,018,940,132</b>



---

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**PADA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TA. 2021**

**Nomor : 700/13/IV.01/40/2022**

**Tanggal : 30 Juni 2022**



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jl. Dr. Soekarno No.43 Telp. (071) 252332, 252729, 252960, (FAX) 252955  
BANDAR LAMPUNG – 35113

## LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Wilayah	: INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
Nomor	: 7001 / D / IV / 014602022
Tanggal	: 30 Juni 2022
Satuan Kerja	: Badan Keahlian Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran	: Tahun Anggaran 2021

### Bab I. Pendahuluan

#### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor : 7001/86/SPT/IV/014602022 tanggal 1 April 2022.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Seuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penilaian dan pengukuran; pengumpulan data; pengklasifikasian; penghitungan, dan pelaporan kinerja pada pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi.

perencanaan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAOP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AOP atau evaluasi atas implementasi SAOP.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 8 April 2022.

### C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus, tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk:

1. Mengetahui informasi mengenai implementasi SAOP;
2. Menilai tingkat implementasi SAOP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AOP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi adalah penelaahan informasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang realistis yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang memperbarikan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/tindakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAOP untuk akuntabilitas dan efisiensi kinerja.

## **E. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (EAKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemudahan) melalui beberapa teknik evaluasi, antara lain:

- Pengumpulan data dan informasi;
- Studi dokumentasi;
- Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- Verifikasi data; dan
- Pengolahan data.

## **F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

### **▶ Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lampiran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lampiran Daerah Provinsi Lampung Nomor 481)
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

- ▶ Ringkasan Rencana Perangkat Daerah Periode 2019 s.d 2024
- ▶ Ringkasan RENCANA Perangkat Daerah Tahun 2021
- ▶ Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

## **G. Gambaran Umum Implementasi EAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, masih terdapat temuan/rekomendasi atas evaluasi AKIP Tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti, yaitu :

1. Bertahan dengan kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan agar dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai standar.
2. Target kinerja Eselon II dan IV dimonitor pencapaiannya.
3. Pengukuran kinerja atas rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

## Bab II. Gambaran Hasil Evaluasi

### A. Kondisi

Berdasarkan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, kondisi berupa gambaran baik, maupun catatan keturapan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta tingkat keberhasilan diperoleh hasil sebagai berikut :

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 21 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub-komponen, sebagai berikut :

##### a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.

Dari hasil evaluasi atas sub-komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, diperoleh nilai sebesar 4,2 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 8,00 yang dirujukkan oleh terdapatnya dokumen.

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)

- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. (Rerja)
- 4) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. (Rencana Aksi)

Namun masih terdapat kelemahan, yang dianda dan belum sepenuhnya dokumen Teknik Perencanaan Kinerja tersebut mengemban mandat kebijakan nasional, program strategis nasional.

- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan peryetaraan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Dari hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, diperoleh nilai sebesar 8,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 yang ditunjukkan oleh:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformasikan
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atau Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai
- 5) Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, terukur secara berkelanjutan (Sustainable- tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan kinerja dapat dicapai (Achievable), menantang dan realistis.
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

8) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang ketuntasan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/bidang tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

9) Setiap unit/lembaga kerja menumuhkan dan menjabarkan Perencanaan Kinerja.

10) Setiap pegawai menumuhkan dan menjabarkan Perencanaan Kinerja.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung belum mengupdate dokumen kinerja / kegiatan pada laman website.

4. **Perencanaan Kinerja** telah dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang berkesinambungan.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 10,5 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 yang ditunjukkan oleh :

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, dan sebaliknya masih on the right / track.
- 4) Rencana awal kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/lembaga kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Target Kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai.

## 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 21 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00. Tingkat akurabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut:

### a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Dari hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Pengukuran Kinerja telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar 4,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 8,00 yang ditunjukkan oleh:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari masih belum sepenuhnya mekanisme pengumpulan data kinerja

### b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 6,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 8,00 yang ditunjukkan oleh:

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.

- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berkala.
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari setiap pegawai belum sepenuhnya melaksanakan / memenuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker).

- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dari hasil evaluasi atas sub-komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 16,8 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 18,00 yang ditunjukkan oleh :

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (peningkatan/pengurangan) targetan kinerja/penghasilan.
- 2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 6) Terdapat efektivitas atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

7) Setiap unit/instansi kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

8) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 18,8 dan nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 20,00. Tingkat akurabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub-komponen, sebagai berikut:

#### a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Dari hasil evaluasi atas sub-komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 3,1 dan nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 yang ditunjukkan oleh dokumen Pelaporan Kinerja yang telah disusun secara berkala, telah diformalkan, telah direvisi, dipublikasikan, dan telah disampaikan tepat waktu.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya direvisi oleh Pejabat yang Berwenang.

#### b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/Keunggulan Kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya;

Dari hasil evaluasi atas sub-komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 3,15 dan nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,00 yang ditunjukkan oleh:

1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar Peraturan No. 53 Tahun 2014

2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan kualitas atau capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan/ny.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan efisiensi atau penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginkukan upaya perbaikan (dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Badan Keutuhan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategik/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 8,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 10,00, yang ditunjukkan oleh :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja bertata telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja bertata telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

- E) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- F) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- G) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari belum sepenuhnya pegawai mempunyai tepadutan dalam penyajian informasi dalam laporan kinerja.

#### 4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 14,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam komponen tersebut, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut:

##### a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan:

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 3,8 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 8,00 yang ditunjukkan oleh:

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/panangkuat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjangka.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Badan Keastuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi Tim Evaluasi SARIP 2020.

##### b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan sumber daya yang memadai:

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 5,28 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,48 yang ditunjukkan oleh :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SKM yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Badan Keastuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya memberikan full pendukung/ kelengkapan Evaluasi AKP yang diminta oleh Tim Evaluasi AKP.

- c. Implementasi SAKP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (jampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja.

Dari hasil evaluasi atas sub komponen tersebut diatas, diperoleh nilai sebesar 7,8 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,80, yang ditunjukkan oleh :

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Namun masih terdapat kelemahan, yang ditandai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung belum memdatangkan hasil Evaluasi SAKIP 2020.

## **B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

- a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Menyusun Dokumen Technis Perencanaan Kinerja dapat memastikan mendapat kebijakan nasional program strategis nasional.
- b. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung segera mengupdate dokumen kinerja / kegiatan pada laman website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- c. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat Menyusun program kegiatan dan penganggaran dalam RKA/ DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

### **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

- a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung lebih optimal dalam melakukan pengumpulan data kinerja.
- b. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan / mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker).
- c. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### **3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

- a. Agar Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat sepenuhnya direvisi oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Agar Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam membuat Dokumen Laporan Kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c. Agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan pengujian

informasi dalam laporan kinerja.

#### 4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- a. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021.
- b. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan bukti pendukung / ketengapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.
- c. Agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP 2021 dengan memberikan bukti pendukung/ ketengapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.

### Bab III. Penutup

#### A. Simpulan

Berdasarkan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 secara umum diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 30 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 21 ;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 30 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 21 ;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 15 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 10,5;
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 25 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 16,25.

Sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021